

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DAN PENYELESAIAN MASALAHNYA
DI KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh :

DIDIK NGUDI UTOMO
B4B.003073

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

DAN PENYELESAIAN MASALAHNYA

DI KOTA SEMARANG

Disusun oleh

DIDIK NGUDI UTOMO
B4B.003073

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

MENTETUI

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

H. ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum
NIP. 130 606 004

H. MULYADI, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ bukan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005

Penyusun

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Tiada tempat gelap di bawah sinar matahari atas ijinMu
- Jika menyerangseranglah secepat angin
Jika mengintaiseanggun Rimba Belantara
Jika mengganas.....menjarahlah seperti api
Jika bertahanbertahanlah sekokoh gunung
Jika menyamar.....seolah tak tertembus gelapnya malam

SUN TZU

KATA BIJAK

- Sesungguhnya orang yang paling berani adalah berani dalam mengambil keputusan.
- Karya lebih unggul dari pada gaya
Prestasi lebih unggul dari pada gengsi

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan kepada :

- Ayahanda (alm) dan ibunda yang telah memberi doa dan cinta kasih tulus sepanjang masa
- Isteri ,tercinta dengan penuh kerelaan dan kesabaran serta **teristimewa** untuk ananda tersayang Dida dan Ulung kalian adalah sumber motivasi hidup dan asset tak ternilai.
- Kakak dan adikku yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang terbaik.

ABSTRAK

Perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen yang sangat pesat ikut pula meningkatkan perkembangan bisnis yang bergerak di bidang otomotif. Dalam kenyataannya perkembangan ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumennya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan nyata yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya, untuk mengetahui hubungan hukum antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya dan dengan pihak yang terkait, serta untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen.

Tesis ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini, sedangkan faktor empirisnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen, yang dalam hal ini adalah PT.Mitsui Leasing Kapital Indonseia dan PT.Wahana Otto Mitra MultiArtha cabang Sermarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai prosedur yang sama dengan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen lainnya yang tunduk pada buku III KUH. Adapun hubungan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, hubungan hukum antara Dealer dengan perusahaan pembiayaan konsumen, dan hubungan hukum antara asuransi dengan perusahaan pembiayaan dan konsumen. Hasil penelitian juga menunjukkan masalah yang umumnya timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah karena tidak terbayarnya pembayaran angsuran dan biaya-biaya lain dengan tepat waktu dan penyelesaian masalahnya adalah ditempuh dengan jalan damai dengan solusi diskon pelunasan dan denda keterlambatan, melakukan oper alih, serta penjualan kendaraan untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya.

Kata kunci : *perjanjian, pembiayaan konsumen.*

ABSTRACT

The company development of consumer financing that very rapid as well to increase the business development have been moved in automotive sector.

In fact the development have emerging a various problems, which relate financing examination that be conducted by its consumers.

The objective of this research that is to describe and analyze the real condition that occurred in an agreement examination of consumer financing that did to knew the law relation among the institution of consumer financing by its consumers and with the related side, as well as to knew what the problems that emerge and how its completion in an agreement examination of consumer financing on institution of consumer financing.

This thesis using an empirically juridical approaches that is a manner or procedure that used to solves problem of research by examine secondary data previously and then continued by establish primary data research. Its juridical factor is sets of court of justice commonly and regulations that due to law sector as a branch of science and be related to this research material, while its empirical factor is company of consumer financing, that in this case is PT Mitsui Leasing Kapital Indonesia and PT. Wahana Otto Multi Artha branch of Semarang.

These researches show that in another agreement examination of consumer financing have the same procedure with each other company of consumer financing be bent in submission on Book III KUH. There's a law relationship that occurred in agreement examination of consumer financing are a law relationship among consumer with company of consumer financing, the law relationship by Dealer with company of consumer financing, and the law relationship among assurance with the company of financing and consumer. This research also shows about problem that usually emerge in an agreement examination of consumer financing because it's not paid the expending and others expenses by on time and its problems solving that take on in peaces procedures with discount paid and overdue of fines, do transferring, as well as sales of vehicle to accomplish its debit.

Keywords: *agreement, consumer financing.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dengan judul : *“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyelesaian Masalahnya di Kota Semarang”*

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi sekaligus Ketua Dewan Penguji yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Achmad Busro, SH, M.Hum selaku pembimbing tesis dan metodologi, atas petunjuk, saran, serta kesabarannya membimbing penyusun dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hadisaputro, SH, MS, selaku Dosen Wali penyusun pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan.

5. Para responden yang terdiri dari ;

- a) Kepada Jefri Ricard PT. Mitsui Capital Leasing Indonesia Cabang Semarang,
- b) Kepada Pahala Motor showroom mobil Semarang.
- c) Kepada PT. Wahana Otomitra Multiartha Cabang Semarang.
- d) Kepada PT. Nasmoco Cabang Semarang.

Yang telah memberikan data dan informasi sehingga membantu terselesaiannya tesis ini

- 6. Istri dan anak-anakku tercinta atas kasih sayang yang tulus diberikan kepada penyusun.
- 7. Teman-teman kuliah khususnya angkatan 2003 yang banyak memberikan support dan perhatiannya kepada penyusun serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tak bisa disebut satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa karya tesis ini banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran demi kesempurnaan. Akhir kata penyusun berharap semoga karya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2005

DIDIK NGUDI UTOMO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Abstract	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penyusunan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Perjanjian Pada Umumnya	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Syarat-syarat Perjanjian	10
3. Azas-azas Perjanjian	12
4. Jenis-jenis Perjanjian	14

5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya	16
B. Perjanjian Kredit	17
1. Perjanjian Kredit Pada Umumnya	17
2. Klausal-klausal Penting dalam Perjanjian Kredit	23
3. Dokumentasi dalam Perjanjian Kredit	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	25
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Dasar Hukumnya .	25
2. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	30
3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen dan Dokumennya	31
 BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Pendekatan	41
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Populasi dan Teknik Sampling	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	45
F. Teknik Penyajian Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Penelitian	37
1. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan Konsumen	47

2. Pelaksanaan Perjanjian Konsumen yang Dilakukan antara Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Konsumennya ...	49
3. Hubungan Hukum antara Lembaga Pembiayaan dengan Konsumen dan dngan Pihak yang Terkait	72
4. Masalah yang Timbul dan Bagaimana Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Lembaga Pembiayaan Konsumen	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan bisnis dan usaha dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana yang dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap langka (belum memadai). Untuk mendapatkan sumber dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat demi kelangsungan hidup, salah satu diantaranya adalah melalui jasa pembiayaan, di samping dengan cara lain melalui jasa perbankan.

Diantara salah satu kegiatan usaha bank adalah penyaluran dana (Fund Lending), dalam hal ini bentuk kegiatan usahanya meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).¹

Di Negara kita lembaga keuangan yang berlaku ada dua golongan yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank yaitu sebagai lembaga yang mempunyai jasa-jasa penyimpanan dana dan penyaluran dana melayani pemerintah, instansi, badan hukum, perorangan dan masyarakat baik lokal nasional maupun internasional.²

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank memiliki ciri pokok bahwa lembaga ini adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan sebagai pemberi kredit atau perantara sumber pembiayaan tetapi tidak dapat melakukan penerimaan simpanan uang dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro dan tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu lembaga keuangan

¹ Abdul Kadir Muhamad, dan Rilda Murmiati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 58.

² Ali Ridlo R., *Hukum Dagang tentang Pinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura*, Haji, Bandung, 1992, hal 47.

bukan bank yang mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan ini adalah jasa lembaga pembiayaan konsumen atau lebih dikenal leasing. Di dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank

Setelah munculnya berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah pembiayaan konsumen yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.³

Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bidang usaha pembiayaan konsumen memang suatu bentuk usaha yang hanya memfasilitasi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan berbagai kesepakatan yang tidak saling merugikan tetapi tujuannya tetap tercapai. Dengan demikian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling ketergantungan, yang penting pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara mengangsur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan konsumen, lebih banyak dikarenakan oleh suatu keadaan bagaimana cara mengatasi permasalahan atau jalan keluarnya apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barang tetapi calon-pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut secara sekaligus atau secara tunai.⁴

³ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 358.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985, hal 52.

Dengan berkembangnya bidang usaha ini, tentunya di bidang hukum pun perlu mempersiapkan dan menyediakan perangkat hukum yang mampu mengontrol, baik dalam bentuk peraturan-peraturan atau pun kebijakan. Karena pertimbangan Ekonomi dan Perdagangan akan diikuti oleh Perkembangan Kebutuhan Kredit.

Pembinaan terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan pengangkutan dan kegiatan proyek pembangunan.⁵

Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor; 1251 /KMK/013/1988 tertanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan (yang telah diubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 468/KMK/017/1995). Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, ditetapkan bahwa khusus di bidang permodalan swasta nasional dan Koperasi wajib setor modal minimal 3 Milyar rupiah, sedangkan untuk perusahaan patungan Indonesia dengan asing wajib setor modal minimal 10 Milyar rupiah. Peraturan atau Undang-Undang yang tidak kalah penting yang berhubungan dengan bisnis ini adalah Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam aspek fidusia memiliki mekanisme dan prosedur yang saling berkaitan dalam memberikan

⁵ Sri Sudewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Cetakan I, Yogyakarta, hal 143.

perlindungan bagi perusahaan pembiayaan atau leasing itu sendiri misalkan tentang tata cara pendaftaran fidusia.

Dalam kaitannya dengan lembaga pembiayaan konsumen maupun leasing itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual-beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut sangat berhubungan dengan hak kebendaan yang salah satu pihak mempunyai batasan hak dan tanggung jawabnya.

Setiap perusahaan baik industri maupun jasa akan membutuhkan adanya dana untuk menunjang jalannya operasi perusahaan tersebut sehubungan dengan sumber dana yang berlainan asalnya, maka diperlukan pengaturan untuk manajemen yang tepat, sumber modal ditinjau dari asalnya dapat dibedakan dalam sumber modal intern dan sumber modal ekstern.⁶

Dengan melihat perkembangan yang ada banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia yang berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 yang dalam mekanismenya berkaitan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Dari hasil penelitian, yang penyusun dapatkan berdasarkan data perusahaan pembiayaan dan barang yang menjadi obyek pembiayaan di Kota Semarang adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang membiayai kendaraan bermotor yaitu mobil dan sepeda motor.

⁶ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit, Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 161.

Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan konsumen yang sangat pesat ikut pula mendorong berkembangnya bisnis yang bergerak di bidangomotif. Dalam kenyataannya perkembangan ini banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumennya. Dengan banyaknya perbuatan hukum yang telah terjadi, baik itu suatu fasilitas kemudahannya, maupun gesekan-gesekan yang disebabkan oleh pihak perusahaan pembiayaan maupun dari pihak konsumen, baik karena kondisi, maupun keterlibatannya dengan pihak ke tiga dan berbagai persoalan lainnya akan membawa suatu akibat hukum yang akan menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Ini bisa terjadi dikarenakan perjanjian tidak dilaksanakan dengan semestinya, timbulnya wanprestasi, adanya faktor risiko yang tidak di bisa dihindari serta masing-masing pihak memanfaatkan kelemahan dari kontrak perjanjian yang telah disepakati sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun perlu untuk dilakukannya penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalahnya di Kota Semarang

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya ?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen dan dengan pihak yang terkait ?

3. Masalah apa yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya dan dengan pihak yang terkait.
3. Untuk memperoleh penjelasan tentang masalah yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen.

D. Manfaat penelitian

1. Segi teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bagi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian pembiayaan konsumen.

- 2.. Segi praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penyusun, lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kajian bagi para pihak yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

E. Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyelesaian Masalahnya di Kota Semarang*”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Teori-teori dan Mengenai Perjanjian, Kredit, perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Jaminan Fidusia. Teori-teori ini mendasari pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh dari survey di lapangan sesuai permasalahan .

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian, yang berisi Gambaran tentang Obyek dan Metode Penelitian yang akan dilakukan serta alasannya.

BAB IV : bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab IV ini akan disajikan Data Hasil Penelitian, Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yang dianalisis. Pembahasan dan sistematika penyajian data sesuai dengan permasalahan.

BAB V : Bab ini merupakan Bab Penutup dari tesis ini yang berisi Kesimpulan dan Saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA

1. Pengertian Perjanjian

Dalam khususnya hukum perdata sering kita jumpai istilah perjanjian. Adanya suatu perjanjian selalu menimbulkan perikatan, bahkan perjanjian memegang peran yang sangat penting dalam melahirkan suatu perikatan. Di samping sumber lain yaitu Undang-undang.

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata mengawali ketentuan Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang Undang.

Perikatan melahirkan “kewajiban“ kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dinamakan prestasi dan berwujud dalam bentuk berikut yaitu :

1. Untuk memberi sesuatu ;
2. Untuk melakukan sesuatu;
3. Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu;

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitor, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditor.⁷

⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Puja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12.

Di kalangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa, perjanjian adalah sama dengan perikatan, ini adalah pendapat yang salah karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan.

Perikatan lahir apabila ada dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mengakibatkan suatu terjadinya hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut.

Pengertian perikatan (*Verbinteniss*) yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.⁸

Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Oleh karena itu setiap masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.⁹

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perjanjian (*overeenkomst*) mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu/lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

⁸ Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 5.

⁹ Advendi, Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2004, hal 16.

Hal ini memberi konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (Kreditor).¹⁰

Kemudian pengertian perjanjian menurut R.Subekti adalah :

*Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.*¹¹

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, SH juga menyatakan pengertian dari perjanjian yaitu:

*Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.*¹²

2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Perjanjian yang sah artinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*Legally Conclude Contract*).¹³

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 92.

¹¹ Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, 1987, hal 1.

¹² Wiryono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981, hal 9.

¹³ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal 188.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orang / subyek-subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian yang mereka adakan. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian bisa dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.¹⁴

Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Dengan demikian maka tidak ada hak bagi para pihak untuk saling menuntut dimuka hakim

Kemudian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat, secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut diatas seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa perjanjian itu boleh dilakukan di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja serta bahwa perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

¹⁴ *Ibid*, hal 20.

3. Azas-azas Perjanjian

Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, azas-azas umum dalam perjanjian adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Azas kebebasan berkontrak

Azas ini artinya bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja dan perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Azas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan dipertegas dengan ketentuan ayat (2) yang berbunyi :

Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

Secara umum kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sebagai azas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

b. Azas Konsensualitas

Azas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu pada syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Azas konsensualitas berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Azas konsensualitas hanya berarti bahwa untuk setiap

¹⁵ Gunawan Wijaya dan Ahamd Yani, *Op.cit.*, hal 19.

perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti azas konsensualitas ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.¹⁶ Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila masing-masing pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Terhadap azas konsensualitas itu terdapat juga pengecualian, yaitu apabila dengan undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, artinya apabila tidak dibuat menurut bentuk cara yang dimaksud, maka perjanjian tersebut diancam batal. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formil.¹⁷

c. Azas personalia

Azas personalia ditemukan dalam rumusan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata yang inti dari isinya masing-masing adalah sebagai berikut :

Pasal 1315 KUH Perdata :

Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri

Pasal 1340 KUH Perdata :

Persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat membawa kerugian mauun manfaat pada pihak-pihak ketiga, selain dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata mengenai suatu pemberian.

¹⁶ Hari Saheroji, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara baru, 1980, hal 86.

¹⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hal 16.

Dari kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, dan pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikianpun penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan).

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Menurut Vollmar perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁸

1. Perjanjian timbal balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak.
 - a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok seperti jual beli, sewa menyewa dsb, yang mana prestasi kedua belah pihak kira-kira adalah seimbang.
 - b. Perjanjian timbal balik tidak sempurna (perjanjian dua pihak secara kebetulan) di mana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang.
 - c. Perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok.

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 48.

2. Perjanjian dapat dibuat dengan cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain kedua prestasi itu adalah saling berhubungan. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian di mana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memakai nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur khusus dalam KUH Perdata, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak dikenal atau diatur khusus dalam KUH Perdata, tetapi dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik (hak eigendom). Adapun perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak yang mengikat untuk menyerahkan suatu benda.

5. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berdasarkan kesepakatan atau penyesuaian kehendak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan penyesuaian saja tetapi ada penyerahan nyata (Pasal 1694 KUH Perdata).

5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya maka dapat dikatakan “Wanprestasi” alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian.

Adapun wanprestasi ada berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁹

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu, apakah yang dilakukan wanprestasi atau lalai. Terhadap kelalaian diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yang terdiri empat macam :

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, ini membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
3. Peralihan resiko, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sesuai Pasal 1237 KUH Perdata.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai di muka hakim.²⁰

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 10, Penerbit PT. Inter Masa, Jakarta, hal 45.

Sedangkan bagaimana tata cara memperingatkan seorang debitur, jika tidak tidak memenuhi teguran itu bisa dikatakan lalai dan diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

Si berhutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ia menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat teguran tidak harus secara tertulis, sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan agar cukup tegas menyatakan desakan si berhutang supaya prestasi segera dilakukan secepatnya. Hanya tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogyanya dengan surat tercatat agar nantinya tidak bisa dipungkiri.

B. PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Kredit pada Umumnya

Memang normalnya, suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya: ²¹

²⁰ Advendi Simangunsong dan Elsi kartika Sari, *Opcit*, hal 16.

²¹ Gatot Wardoyo Ch., *Kredit Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Bank*, Bandung, 1995, hal 164.

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Menurut ilmu hukum perjanjian, perjanjian kredit pada hakikatnya tergolong ke dalam beberapa golongan perjanjian. Untuk itu akan ditinjau penggolongan tersebut.

a. Apakah Perjanjian Kredit Merupakan Perjanjian Bernama

Menurut sistem hukum perjanjian kita, yang berlandaskan pada KUH Perdata, khususnya buku ketiga, maka suatu perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- b. Perjanjian bernama dan
- c. Perjanjian umum

Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dengan memakai nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur khusus dalam KUH Perdata. Dengan ketentuan-ketentuan khusus tentang perjanjian bernama yang bersangkutan berlaku terhadap perjanjian yang sedang dibuat tersebut.

Dalam hal perjanjian kredit, ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian semacam itu digolongkan ke dalam salah satu perjanjian

bernama. Jadi, bukan ke dalam perjanjian umum. Perjanjian bernama tersebut adalah perjanjian pinjam pakai habis, yang diatur di dalam Bab XIII KUH Perdata. Pendapat seperti ini, misalnya dianut oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. Beliau mengatakan bahwa dalam hubungan dengan perjanjian kredit, "Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata. Akan tetapi, dalam hal ini, sependapat dengan pendapat KUH Perdata. Perjanjian kredit bukan perjanjian bernama menurut kategori KUH Perdata, melainkan hanya merupakan perjanjian umum."²²

Sebenarnya apapun nama suatu perjanjian, namun yang paling penting adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian itu. Dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak akan jelas dan lagi pula, kita tidak akan memberi kesempatan atau peluang kepada hakim yang akan mengadili perselisihan tentang perjanjian itu untuk memberikan interpretasi lain atau melaksanakan perjanjian itu lain dari yang dimaksudkan para pihak.²³

Menurut Pasal 1740 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perjanjian pinjam pakai (tidak habis) adalah suatu perjanjian terhadap mana para pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai secara gratis kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan,

²² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komtemporer*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 33.

²³ Kartini Muljadi, *Leasing Ditinjau dari Aspek Hukumnya*, Seminar Penjagaan Alternatif Pendanaan Proyek Industri Kimia Dasar dengan Sistem Leasing, Jakarta, 13-14 Mei 1985.

akan mengembalikan barang itu. Jadi pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.²⁴

Sementara itu yang dimaksud dengan perjanjian pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian dimana pihak pemilik menyerahkan sesuatu barang yang dapat habis terpakai kepada pihak pemakai, dengan ketentuan bahwa pihak pemakai itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pemilik dalam jumlah dan keadaan yang sama, vide Pasal 1754 KUH Perdata.

Dengan demikian, maka perjanjian kredit bukanlah perjanjian pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUH Perdata, melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan pasal-pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek, dan yurisprudensi.

b. Perjanjian Kredit Sering kali Merupakan Perjanjian Baku

Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah:

Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dan

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1983, hal 28.

beberapa hal dijanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.²⁵

Banyak masalah hukum bisa timbul dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku seperti ini, antara lain berkenaan dengan:

- a. Legalitas Perjanjian Baku
- b. Berkenaan dengan Klausul yang Memberatkan

Ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku sulit diterima. Hal ini disebabkan

1. Kedudukan pihak pembuat kontrak baku dalam transaksi yang bersangkutan sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio Particuliere Wetgever*)
2. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa (*dwang contract*).
3. Terutama di Negara-negara yang menganut *System Common Law*, berlaku doktrin *Unconscionability*. Doktrin *Unconscionability* ini mengajarkan bahwa hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu kontrak (sebagian atau seluruhnya) jika terdapat klausul dalam kontrak tersebut yang seyogyanya tidak mungkin dibuat, atau walaupun dibuat, seyogyanya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil (*a fair and honest man*). Sebab klausul seperti itu dianggap menindas dan tidak adil.

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 66.

Dalam suatu perjanjian baku, sering kali terdapat klausul-klausul yang memberatkan sesuatu pihak. Yakni memberatkan pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku tersebut. Dalam literature Belanda, klausul yang memberatkan salah satunya pihak ini sering dengan *Onredelijk bezwarend*.

Adapun yang dimaksud dengan klausul eksemsi adalah suatu klausul dalam suatu kontrak, dalam hal ini kontrak perjanjian kredit, yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak (in casu pihak bank) terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*.

Kadang-kadang bahkan klausul eksemsi ini jelas sekali terlihat dalam kontrak. Misalnya, terdapatnya kalimat “kreditur tidak bertanggung jawab jika...” atau “kreditur hanya bertanggung jawab sampai batas sebesar sekian rupiah saja, jika terjadi hal-hal ...”.

Menurut KUH Perdata, klausul eksemsi tidak menjadi masalah asal syarat sahnya perjanjian dipenuhi. Misalnya, jika dipenuhi unsur kesepakatan kehendak vide Pasal 1320 KUH Perdata, dalam kontrak tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu. Juga, kontrak tersebut misalnya tidak melanggar kebiasaan atau beritikad baik. Selama hal-hal tersebut dipenuhi, maka tidak ada ketentuan dalam KUH Perdata dengan tegas melarang klausul ekstensi.

Seringkali perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dengan disana-sini diadakan penyesuaian seperlunya, karena biasanya pihak bank telah mempunyai form tersendiri, dimana para pihak tinggal mengisi data pribadi dan data tentang kredit yang diambil. Sedangkan terms dan conditions-nya juga sudah dicetak secara baku.

2. Klausul-Klausul Penting dalam Perjanjian Kredit

Ada beberapa klausul penting dari perjanjian kredit yang kita dapat dalam hampir semua jenis perjanjian kredit, yaitu tentang:²⁶

1. Definisi-definisi
2. Uang Pinjaman yang diberikan,
3. Biaya-biaya,
4. Representasi dan Waransi,
5. Hal-hal yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur,
6. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terutama oleh pihak debitur,
7. Jaminan hutang,
8. Conditions precedent,
9. Event of default,
10. Lain-lain.

Jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan. Di mana tentang rincian dari masing-masing jaminan hutang tersebut termasuk draft dokumen jaminan hutang, akan diperinci dalam bagian lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Opcit, hal 40..

Beberapa Jenis jaminan hutang yang lazim diberikan antara lain:

- a. Hak tanggungan atas tanah
- b. Hipotik
- c. Fidusia
- d. Gadai
- e. Corporate Garansi
- f. Personal Garansi
- g. Pengalihan Tagihan (*receivable assignment*)
- h. Dan lain-lain.

Sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan.²⁷

Pemberi jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur.²⁸

3. Dokumentasi dalam Perjanjian Kredit

Di samping perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam setiap transaksi kredit, maka terdapat juga dokumen-dokumen lain yang menyertai, mengikuti atau mendahului perjanjian kredit tersebut. Karena itu,

²⁷ Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perdata di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit : Liberty, Cetakan I, Yogyakarta, hal, 1, 43.

²⁸ Subekti R., *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit: Alm, Bandng, hal 27.

di samping dokumen pokok tersebut, kita dapat memilah-milah berkas dokumen-dokumen lain itu ke dalam:²⁹

- a. Dokumen pendahuluan,
- b. Dokumen jaminan,
- c. Dokumen legalitas, dan
- d. Dokumen instrumentalia.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Dasar Hukumnya

Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.³⁰ Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa; maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. (A. Abdurrahman, 1991; 242).

Keputusan Menkeu No. 1251/ KMK.013/ 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/ KMK.017/

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komtemporer*, hal 52.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 162.

2000, tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan”.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Perusahaan Pembiayaan adalah suatu Lembaga Pembiayaan di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat (5) Keppres RI No. 61 Tahun 1988 dinyatakan bahwa:

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.³¹

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah suatu kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Adapun pengertian perikatan diatur dalam KUH Perdata.

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu.

³¹ Retno Wulan Sutanto, *Perjanjian Konsumen Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Teknis Yustikal*, MARI, Jakarta, 1994, hal 3.

Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh *General Motor Acceptance Corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General Motors*.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *sale kredit* adalah menerima barang tersebut. Sementara dengan *loan credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga di kemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *sale credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.

Atas dasar kepemilikannya, Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:³²

- a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang merupakan anak dari perusahaan *supplier*.
- b. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan *supplier*.
- c. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan *supplier*.

Dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan seperti halnya yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Asas tersebut dinamakan “*the five of credit analysis*”,

³² Sri Susilo Y., Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hal 149-151.

yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut:³³

- 1) Watak (*Character*)
- 2) Kemampuan (*Capacity*)
- 3) Modal (*Capital*)
- 4) Jaminan (*Collateral*)
- 5) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar hukum pembiayaan konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan hukum yang bersifat administratif.³⁴

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Se jauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1. Dasar Hukum Substantif Murni

Bahwa yang menjadi dasar hukum substantif murni bagi kegiatan pembiayaan konsumen adalah adanya asas kebebasan berkontrak. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah

³³ Retnowulan Sutantio, *Opcit*, hal 4.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 164.

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, para pihak boleh/ diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

2. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedur

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu pada hakekatnya adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Dengan demikian bagi para pihak yang akan membuat perjanjian pembiayaan konsumen ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum substantif.

b. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat administratif bagi keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen diantaranya adalah:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/ 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanya beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu :

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
2. Pihak konsumen
3. Pihak penjual
4. Pihak perusahaan asuransi

Namun demikian mengingat penyediaan dana pembiayaan tersebut dimaksudkan hanya untuk membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkan konsumen (tidak diperuntukkan untuk kebutuhan lain selain membeli barang tertentu), maka dalam hal ini munculnya pihak lain yaitu penjual menjadi syarat untuk terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen.

Jika salah satu pihak ada yang dirugikan secara material diselesaikan dengan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak lawan. Dalam hal ini hingga melahirkan tanggung jawab masing-masing pihak, adapun tanggung jawab tersebut meliputi :

- a. Atas, terhadap, dalam hal berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab.
- b. Kepada (ditujukan).menanggung segala sesuatupun (kepada) pihak lain.³⁵

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, adalah bertanggung jawab kepada pihak lawan menurut apa yang tercantum dalam perjanjiannya yang memiliki akibat hukum jika sesuatu hal terjadi.

³⁵ Poerwadarminto WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

Sedangkan menurut Albulkadir Muhammad tanggung jawab merupakan realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses) yang hasilnya ialah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna. Dikatakan sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pihak lain memperoleh haknya. Dikatakan tidak terpenuhi secara tidak sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh hak sebagaimana mestinya.³⁶

Jadi untuk memenuhi prestasi itu adalah memberikan kewajiban yang perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.³⁷

3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen dan Dokumennya

Menurut Satjipto Rahardjo hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang diskualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.³⁸

³⁶ Abdul Kadir Muhamad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 18.

³⁷ Opcit, hal 19.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 39.

Obyek hukum di sini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum. Selanjutnya tiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut:

1. *Bevoeg Heid* atau kewenangan yang disebut Hak.
2. *Plicht* atau kewajiban.³⁹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak perusahaan asuransi. Perjanjian pembiayaan konsumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dikarenakan adanya perjanjian dan atau kesepakatan yang diadakan maupun dibuat oleh dua orang atau lebih menimbulkan akibat hukum baik berupa hak, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat akibat perjanjian itu.

Sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata : Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Untuk dapat mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum

³⁹ Suroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 270.

antara para pihak. Adanya 3 pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut menimbulkan 3 hubungan hukum, yaitu:

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Pihak Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan pihak konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur, sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata dapat digunakan untuk perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditanda tangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Dalam hal ini berbeda dengan kontrak *leasing*, di mana secara yuridis barang *leasing* tetap menjadi miliknya pihak kreditur (*lessor*) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak *lessee*.⁴⁰

⁴⁰ Munir Fuady, *Opcit*, hal 166.

Menurut asal katanya, *fiducia* berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. *Fiducia* atau lengkapnya *Fiduciare Eigendoms Overdracht* sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda tidak bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.⁴¹

Antara konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen diadakan perjanjian di mana ditentukan bahwa konsumen meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara *fiducia* sebagai jaminan kepada pemberi kredit.

b. Hubungan Pihak *Supplier* dengan Konsumen

Antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak *supplier* selaku penjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan Penyedia Dana dengan *Supplier*

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang

⁴¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal 21.

disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, perlu ada pihak lain yang ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas objek perjanjian ini, maka kemunculan pihak perusahaan asuransi yang menjadi syarat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen.

Sebagai konsekuensi dari prinsip jaminan adalah pengandilan hak (*subrogasi*) dari tertanggung kepada penanggung bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada penanggung.

Subrogasi menurut terjadinya dibedakan berdasarkan perjanjian dan berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Pasal 1401 dan 1402 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1401 KUH Perdata : subrogasi terjadi dengan persetujuan :

1. *Apabila debitur dengan menerima pembayarani itu dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap debitur.*
2. *Apabila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak debitur. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan debitur.*

Pasal 1402 KUH Perdata : subrogasi terjadi demi undnag-undang :

1. *Untuk seorang, sedang ia sendiri debitur melunasi seorang berpiutang lain yang berdasarkan hak-hak istimewanya atau hipoteik mempunyai suatu hak yang lebih tinggi.*
2. *Untuk seorang pembeli suatu benda tak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik.*

3. *Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, diwajibkan membayar suatu utang berkepentingan untuk melunasi utang itu.*
4. *Untuk seorang ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar hutang-hutang warisan dengan uangnya sendiri.*

Sedangkan pasal dalam KUHD yang mengatur tentang subrogasi hanya satu, yaitu Pasal 284 KUHD yang menyatakan:⁴²

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Maksud dari orang ketiga dalam KUHD ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan istilah orang ketiga dalam KUH Perdata. Bila dalam KUH Perdata yang dimaksud dengan orang ketiga adalah orang yang menggantikan orang yang berpiutang dalam suatu persetujuan. Sedangkan dalam KUHD pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab harus membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlu ada pihak lain yang ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas obyek perjanjian ini. Maka dibutuhkan

⁴² Subekti dan R. Tjipto Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 80.

kemunculan pihak perusahaan asuransi yang menjadi syarat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 246 KUHD memberikan pengertian tentang asuransi yaitu :

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Risiko kehilangan dalam asuransi, dapat berupa kehilangan sebagian (*partial loss*) atas kepentingan dan juga dapat berupa kehilangan seluruhnya (*total loss*). *Total loss* memperoleh ganti rugi penuh dari penanggung, sedangkan *partial loss* memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang diderita, asalkan ditutup asuransi untuk risiko atau bahaya yang mengakibatkan kerugian.⁴³

Pada dasarnya yang dapat dipertentangkan asuransi/ Pertanggungan Kredit adalah penagihan-penagihan dalam hal ini haruslah diartikan sebagai pengertian yang luas. Yaitu bukan yang hanya timbul dari suatu transaksi saja, tetapi setiap hal penagihan terhadap pembayaran (misal uang muka yang diberikan oleh suatu badan/lembaga).⁴⁴

Untuk keperluan administrasi dan penilaian layak tidaknya konsumen mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen biasanya perusahaan pembiayaan konsumen mensyaratkan konsumen untuk

⁴³ Radik Purba, *Mamahami Asuransi di Indonesia*, Terma Grafika, Jakarta, 1995, hal 32.

⁴⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Pertentangan*, Yogyakarta , Seksi FH. UGM, 1983.

menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dana pembiayaan konsumen itu dikabulkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

a. Permohonan/penawaran jasa pembiayaan konsumen oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan :

A. Untuk perorangan

- 1) Surat keterangan penghasilan pemohon
- 2) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- 3) Rekening listrik pemohon
- 4) Foto copy kartu keluarga pemohon

B. Untuk perusahaan

- 1) Salinan akta pendirian dan perubahannnya
- 2) Jenis usaha
- 3) SIUP atau NPWP dan TDP
- 4) Rekening Koran 3 bulan terakhir
- 5) Foto copy KTP yang mewakili pengurus dan Komisaris

b. Akta perjanjian pembiayaan konsumen.

c. Dokumen jaminan seperti surat-surat faktur-faktur dan/atau dokumen bukti kepemilikan atau barang jaminan (BPKB).

Mengingat metode yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal penguasaan barang berada di pihak konsumen, untuk mengatasi terhadap kelalaian, khususnya pihak konsumen yang nakal dan tidak kooperatif sering mengalami kesulitan. Maka untuk melawan sang “monster” tersebut, banyak perusahaan pembiayaan konsumen mencoba

menggunakan unsur kepolisian, walaupun masih dipertanyakan kewenangan kepolisian ini. Satu hal lain, mengingat perjanjian pembiayaan konsumen termasuk wanprestasinya, belumlah termasuk dalam masalah pidana, tetapi hanya kasus perdata murni.

Alternative lain yang sering juga diambil dalam praktek, yaitu dengan menyerahkan kasus pada juru tagih (*debt collector*), amatir maupun profesional. Hanya saja jika para juru tagih ini menggunakan cara-cara intimidasi dan kekerasan, yang biasanya dilakukan oleh juru tagih “tukang pukul”, maka ini sudah riskan dan keluar dari jalur hukum yang seharusnya. Bahkan sering kali terdengar, bahwa jika juru tagih “tukang pukul” ini gagal dalam melakukan penagihan, dia akan segera memangsa kliennya sendiri, yaitu pihak perusahaan pembiayaan.

Untuk menjaga apabila terjadi di kemudian hari seperti yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu sering terjadi ingkar janji, dan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak debitur/ konsumen yang ingkar janji tersebut. Berkisar mengenai soal pembayaran uang sewa/ angsuran atau pembayaran lainnya yang sesudah merupakan kewajiban pihak-pihak kreditur/konsumen atau juga mengenai dilanggarnya kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan seperti yang tercantum dalam perjanjian kontrak.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari kedua belah pihak yaitu dengan cara damai. Tetapi perlu dijelaskan lagi bahwa perdamaian itu dilakukan kedua belah pihak di luar sidang tersebut, dalam prakteknya hanya berkekuatan sebagai

persetujuan belaka. Apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan lagi persengketaan tersebut melalui proses di pengadilan.

Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dijamin suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat dari yang semula.⁴⁵

Oleh karena itu alternative lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian persengketaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut ialah dengan cara melalui suatu badan yang disebut Badan Arbitrase. Hal ini dilakukan apabila sejak semula para pihak telah mengadakan perjanjian dalam kontrak perjanjian itu sendiri.

⁴⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata (dalam Teori dan Praktek)*, Penerbit ALM, 1983, Bandung, hal 37-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam satu penelitian karya ilmiah. Karena metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan. Dengan demikian maka diperlukan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.¹

Jika kita membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan maka yang dibicarakan adalah metode penelitian.²

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981, hal 4.

² Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1998, hal 52.

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini, sedangkan faktor empirisnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif, karena data yang diperoleh dari penelitian berusaha memberi gambaran tentang proses dan seputar permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyajian pembiayaan konsumen, serta menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.³

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Semarang dan para nasabah serta dealer.

b. Sampel

Penulis dalam penelitian ini tidak meneliti semua populasi, tetapi mengambil sampelnya. Adapun teknik pengambilan sampel adalah melalui *non random* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, yaitu pihak manajemen perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Semarang yang tugasnya di bagian analisis kredit serta para nasabah yang melakukan perjanjian kredit.

Adapun responden sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan PT. Wahana Otto Mitra Multiartha Tbk. Cabang Semarang atau staf yang ditunjuk mewakilinya.
2. Pimpinan PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia Cabang Semarang atau Staf yang ditunjuk mewakilinya.
3. Pimpinan dealer mobil atau motor Semarang
4. Dua orang nasabah.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

³ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1983, hal 63.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer atau diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kepada pertanyaan yang lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti peraturan-peraturan hukum, buku-buku, sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti termasuk data-data lain yang ada pada instansi-instansi terkait maupun yang diperoleh dari obyek penelitian..

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari analisa terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada dan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum Perdata.

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum perjanjian sebagai salah satu cabang ilmu hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

- Hasil penemuan atau pendapat ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian termasuk yurisprudensi baik dalam maupun luar negeri.
- Berbagai literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier:

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

E. Teknik Penyajian Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka data yang ada diolah. Dalam proses ini akan diadakan *editing*, yaitu kegiatan memeriksa, atau meneliti data yang diperoleh untuk melihat apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan atau belum. Selanjutnya dalam editing diadakan pembetulan data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya tesis dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan atas dasar penelitian yang ada.

F. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berbentuk uraian bukan berebntuk angka-angka. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lesan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan (diinterprestasikan) sehingga akan menghasilkan suatu data yang deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti.

Dengan menganalisa data yang terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis. Data yang berupa uraian tersebut setelah dianalisa kemudian pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk laporan penelitian tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah suatu perusahaan yang memberikan pembiayaan pelayanan untuk kendaraan roda empat dan roda dua baik kendaraan yang masih baru maupun bekas. Perusahaan pembiayaan konsumen ini berkembang sangat pesat dan masyarakat cenderung menggunakan fasilitas pembiayaan ini dikarenakan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah serta syarat ringan dibanding pembiayaan yang lain.

Dari data yang ada di lapangan perusahaan pembiayaan yang membiayai kendaraan mobil baru atau bekas di Kota Semarang antara lain PT. Mitsui, PT. ACC, Otto, Swadarma, Orix, Dipo, Adira, Kembang 88, Mitra Dana, Citra dan sebagainya. Sedangkan perusahaan yang membiayai untuk motor baru dan bekas adalah : Para, Wom, Otto, Adira, FIF, BFI, Mandala dan sebagainya.¹

Beberapa jenis merk dan tipe kendaraan mobil yang dibiayai adalah :

- Toyota

Pada umumnya Toyota Minibus Kijang, Toyota jenis sedan Corolla, masih bagus harga jualnya, kecuali model atau tipe Corona dan Crown.

¹ Untung, *Wawancara*, Pemilik dan Show Room Mobil Bekas dan Motor Bekas Pahala Motor Jl. Wahidin (Oktober 2005)

Toyota Minibus Kijang yang masih bagus harga jualnya adalah Karoseri Astra.

- Suzuki

Kendaraan mobil merk Suzuki masih bagus harga jualnya untuk jenis Katana, Carry Futura, Forsa, Amenity, Escudo, Vitara dan Eksteem.

Untuk jenis minibus dilihat dari jenis karoseri pembuatannya yang masih bagus harga jualnya adalah Real Van, Futura, Adi putra, Alexander dan New Armada.

- Daihatsu

Jenis mobil minibus Daihatsu yang masih disukai adalah tipe Zebra dan Espass

- Honda

Kendaraan mobil merk Honda masih bagus harga jualnya untuk jenis Oddisse, CR-V, Jazz, New Stream, Civic, Accord dan sebagainya.²

Sedangkan untuk beberapa jenis merk dan tipe kendaraan roda dua adalah :

- Honda : Supra-X, Supra Fit, Mega Pro, Tiger, Karisma, dan sebagainya.
- Suzuki : Satria, Shogun, RGR, Tornado dan sebagainya.
- Yamaha : Mio, Jupiter-Z, Vega-R, Cripton dan sebagainya³

Ada beberapa pihak yang terkait dalam perjanjian konsumen tersebut sebelum perjanjian ini dilaksanakan antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumennya.

² Jefri Richard, *Wawancara* dengan Karyawan PT. Mitsui Cabang Semarang (Oktober 2005), Suko Wawancara, PT. WOM. (Oktober 2005).

³ Materi Pelatihan, *Training dan Recruitment*, PT. Wahana Otto Mitra Multi Artha.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah :

- a. Pihak lembaga pembiayaan
- b. Pihak konsumen
- c. Pihak dealer atau show room
- d. Asuransi

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian yang disepakati antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya di Kota Semarang ini rata-rata hampir sama menggunakan perjanjian dalam bentuk baku yang isi dan tanggung jawabnya hampir sama pula. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku atau standart karena dalam prakteknya setiap lembaga pembiayaan menyediakan blanko (formulir model) formulir ini disodorkan kepada setiap konsumen pemohon kredit dan kepada pemohon dimintakan pendapatnya apakah setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang ada dalam formulir tersebut yang membedakan jumlah pembiayaan, bunga, jangka waktu, harga barang, dan jenis merk saja.⁴

2. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Dilakukan Antara Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Konsumennya

Lembaga pembiayaan sebelum melakukan perjanjian pembiayaan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan dealer atau show room terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi antara konsumen yang mau membeli barang di dealer tersebut.

⁴ Taufik, *Wawancara*, Head Marketing PT. WOM (Oktober 2005)

Perjanjian kerjasama dengan dealer atau show room harus dilakukan, untuk mengetahui layak atau tidak layaknya dealer atau show room tersebut untuk di ajak kerjasama dalam terjadinya proses pembiayaan tersebut guna menghindari dealer atau show room yang nakal agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Adapun dealer atau show room yang boleh melakukan kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Dealer authorized baik mobil baru atau motor baru
- b. Sub dealer authorized dengan surat penunjukkan dari dealer authorized mobil baru atau motor baru
- c. Show room mobil bekas
- d. Show room motor bekas

Sedangkan data-data yang harus di lampirkan dalam perjanjian kerjasamanya adalah:

- a. Speciment, tanda tangan yang sesuai di dealer atau sub dealer atau show room akta pendirian (kuasanya)
- b. Fotocopy KTP yang berwenang (authorized persons)
- c. Surat penunjukkan dari dealer (kalau bukan dealer authorized)
- d. Akta pendirian dan perubahannya
- e. Surat keputusan menteri kehakiman
- f. SIUP
- g. TDP
- h. Nomor rekening bank, dll.

Ketentuan yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama antara lain :

- a. Untuk mobil baru atau motor baru kerjasama perjanjian hanya dapat dilakukan oleh dealer-dealer authorized atau sub dealer dengan surat penunjukkan dealer.
- b. Untuk mobil atau motor bekas dapat dilakukan untuk semua show room di Kota Semarang.
- c. Untuk mobil bekas lain show room adalah kaki lima (K5) atau perorangan dapat melakukan kerjasama dengan syarat yang pernah ditentukan.⁵

Disamping perjanjian kerjasama pembiayaan dengan dealer atau show room ada juga perjanjian kerjasama dengan pihak asuransi. Dalam bidang pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan konsumen roda dua dan roda empat asuransi merupakan pihak yang sangat penting dalam rangka menjaga dalam hal resiko yang mungkin terjadi pada saat jangka waktu kredit. Pihak lembaga pembiayaan biasanya melakukan kerjasama dengan pihak asuransi tergantung dengan perusahaan asuransi mana yang akan dipilih. Pihak konsumen boleh menentukan dengan asuransi mana yang akan dipilih asal dengan pihak asuransi yang bekerjasama dengan pihak pembiayaan tersebut.

Ini tentunya perusahaan asuransi yang memberikan kemudahan dalam proses klaim maupun harga atau rate dengan nilai pertanggungan yang murah. Proses pelaksanaan pembiayaan diawali dengan pihak konsumen yang akan melakukan pembelian mobil atau motor baik baru maupun bekas di dealer atau show room atau K5 dan perorangan secara kredit.

⁵ Jefri Richard, *Wawancara*, Analisis Kredit PT. Mitsui Cabang Semarang (Oktober 2005)

Selain pembelian mobil atau motor baik baru maupun bekas juga melayani konsumen yang akan membutuhkan dana pembiayaan yang khususnya terhadap dana pembiayaan mobil bekas.

Sebelum perjanjian pembiayaan dilakukan terlebih dahulu konsumen melakukan permohonan kredit yang dipandu pihak dealer atau show room yang disediakan pihak lembaga pembiayaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pengecekan terhadap calon konsumen tersebut. Pihak dealer atau show room biasanya sudah dibekali beberapa syarat dan perhitungan yang akan diberikan kepada calon konsumen sebelum melakukan pembelian atau pembiayaan (yang membutuhkan dana).

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan dealer atau show room tersebut maka pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan proses analisa terhadap permohonan tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap calon konsumen yang datang langsung membutuhkan dana pembiayaan terhadap mobilnya. Proses analisa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan dengan pegawainya adalah untuk menentukan apakah pemohon kredit tersebut akan disetujui atau tidak.

Sehubungan dengan banyaknya kompetisi baik pihak perusahaan pembiayaan tersebut ataupun dealer atau show room maka dituntut proses analisa yang secepat mungkin keputusan terhadap permohonan kredit disetujui atau ditolak. Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan dituntut untuk memberi keputusan layak atau tidaknya permohonan kredit tersebut dalam jangka waktu satu hari terhitung permohonan kredit masuk (*one day service*).

Dengan demikian pihak konsumen harus memberikan beberapa syarat yang mudah, sederhana dan ringan agar perusahaan pembiayaan dapat memberikan keputusan secepatnya.

Menurut Bapak Apip Nur Aflia Hakim selaku konsumen PT. Mitsui, syarat untuk mengajukan permohonan kredit di perusahaan pembiayaan relatif tidak sulit, hanya melampirkan foto copy KTP, suami istri, rekening listrik, Kartu Keluarga, dan photo copy buku tabungan.⁶

Adapun syarat-syarat yang harus di lengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat umum untuk pemohon kredit:
 - Perorangan
 - Wiraswasta
 - Kolektif
 - Badan hukum atau badan usaha
- b. Syarat perorangan /kolektif/ wiraswasta
 - Usia dewasa pemohon : 21 s.d 60 th atau sudah menikah bagi yang berusia di bawah 21 th
 - Mempunyai status tempat tinggal milik sendiri atau kontrak tanah atau bertempat tinggal di tempat mertua/orang tua/saudara dengan di lampiri penjamin dari pemilik rumah yang di tempati
 - Nomor telpon rumah atau kantor atau penghubung atau alat komunikasi yang lain(hp, pager,dan sebagainya) diharapkan ada.
 - Rekomendasi dari perusahaan ada dan jelas

⁶ Apip Nur Alfia Hakim, *Wawancara*, Semarang, 3 Nopember 2005.

- Masa kerja bagi karyawan minimal sudah bekerja satu tahun untuk pendapatan baik gaji dan penghasilan perbulan minimal tiga kali nilai angsuran setiap bulannya.
 - Penjamin wajib ada untuk kolektif
 - Tempat usaha harus ada bagi pemohon untuk wiraswasta
- c. Syarat untuk badan hukum atau badan usaha :
- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir
 - SIUP
 - TDP
 - NPWP
 - Nama dan alamat perusahaan
 - Nomor telpon
 - Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir
 - Jenis usaha harus jelas dan aktif minimal satu tahun
 - KTP pengurus perusahaan berdasarkan akte perusahaan (sebagai pemohon kredit)
 - KTP komisaris perusahaan sesuai berdasarkan akte perusahaan (sebagai penjamin kredit)

Sedangkan persyaratan foto copy dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

- KTP (kalau tidak ada bisa diganti surat keterangan RT atau surat keterangan domisili)

- KK (kalau tidak ada bisa diganti dengan surat nikah, foto copy ijazah atau akte kelahiran)
 - Rekening listrik/ rekening telpon/ rekening PDAM (kalau tidak ada bisa diganti bukti PBB atau akte jual beli atau perjanjian kontrak rumah)
 - Rekening tabungan atau rekening koran (dapat diganti dengan surat keterangan gaji, jabatan, masa kerja di perusahaan, keterangan penghasilan, bon, faktur bagi wiraswasta)
 - KTP penjamin (istri, suami, ibu, bapak, famili, atasan, pengampu, atau orang yang dituakan)
- d. Syarat untuk obyek pembiayaan adalah :⁷
- Dikhususkan terhadap mobil baru atau motor baru yang diprioritaskan terhadap jenis kendaraan, tipe dan merk kendaraan dan harga jual kembali serta daya beli masyarakat yang masih terjangkau secara umum.
 - Untuk mobil atau motor bekas di perusahaan pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia membatasi tahun pembuatannya tidak lebih dari umur 7-8 tahun untuk merk-merk tertentu. Sedangkan untuk motor bekas di PT. Wahana Otto Mitra Multiartha Tbk. sampai dengan tahun pembuatan tidak lebih dari 5-6 tahun.

Setelah menerima aplikasi pemohon kredit beserta lampiran-lampiran dan syarat yang telah diserahkan kepada petugas analis kredit di perusahaan

⁷ Suko Handoko, *Wawancara*, Head Marketing PT. WOM Cabang Semarang (Oktober 2005), Jefri Ricard, PT.Mitsui, (November 2005).

pembiayaan maka dilakukan analisa untuk persetujuan kredit. Analisa persetujuan kredit meliputi :

- Analisa data pemohon
- Analisa produk
- Analisa wawancara
- Analisa konsumen

a. Analisa Data Pemohon

1. Identitas

Dasar analisa data pemohon untuk mengetahui pemohon adalah benar atau bukan atau fiktif. Hal ini dapat dilihat dari dokumen berupa KTP, SIM, atau Pasport atau KIMS bahwa identitas pemohon sesuai dengan aslinya dan alamat yang tertera dalam identitas tersebut.

Cara menganalisa :

- Dengan melihat tanggal berlakunya, tanda tangan 'ID' sama dengan tanda tangan yang diaplikasi atau tidak.
- Apakah dikeluarkan oleh instansi resmi
- Alamat KTP jelas atau sama dengan di KK
- Alamat KTP sama dengan alamat di aplikasi. Apabila ternyata berbeda perlu dilampirkan surat keterangan RT atau RW setempat dimana pemohon sekarang tinggal.

2. Tempat tinggal atau Residence

Untuk mengetahui apakah pemohon benar-benar bertempat tinggal seperti yang dikatakan atau dituliskan.

Dasarnya :

- KTP / KK
- Kartu listrik
- Keterangan domisili
- Sertifikat rumah
- Perjanjian kontrak

Cara menganalisa :

- Status tempat tinggal (kontrak, rumah dinas, milik sendiri, kredit, dll)
- Status sosial (lokasi tempat tinggal, kumuh/ tidak)
- Masa berlaku perjanjian kontrak masih lama atau tidak
- Perjanjian antara siapa dengan siapa
- Identifikasi peta lokasi/ tempat tinggal.

3. Pekerjaan / Employment

Untuk mengetahui apakah pemohon benar-benar bekerja pada tempat/ perusahaan seperti yang dikatakan atau yang dituliskan.

Dasarnya :

- Kartu karyawan
- Slip gaji
- Surat keterangan perusahaan
- SIUP, TDP, akte pendirian perusahaan
- Surat penunjukkan/ pengangkatan

Cara menganalisa :

- Cek ejaan nama, apakah sama dengan ejaan di KTP atau aplikasi
- Sudah berapa lama bekerja
- Nama dan alamat perusahaan
- Bidang usaha perusahaannya
- Pada departemen/ divisi/ bagian apa yang bersangkutan bekerja
- Identifikasi peta atau lokasi kantor

4. Penghasilan/ Income

Untuk mengetahui apakah pemohon benar-benar mempunyai penghasilan seperti yang dikatakan / dituliskan pada form jual beli, dan untuk mengetahui sumber pendapatan lainnya (istri bekerja, penghasilan tambahan, dan lain sebagainya).

Dasarnya :

- Slip gaji
- Rekening koran
- Faktur/ kwitansi/ bon/ surat pembelian
- Foto copy kartu kredit

Cara menganalisa :

- Cek foto copy slip gaji, ada kejanggalan atau tidak
- Wajarkah jumlah gaji dengan jabatan
- Tabungan/ data-data saldo
- Jenis kartu kredit dan masa berlakunya
- Cek besar pendapatan terhadap angsuran

b. Analisa Produk/ Obyek

Dasarnya :

- Produk tersebut masih langka
- Tergolong pada kendaraan mewah atau standart
- Keberlangsungan tentang produk tersebut untuk tahun-tahun mendatang

Price :

- Sesuaikan dengan kondisi harga pasar
- List otomotif (penambahan maksimum up-ing price)
- Harga jual authorized dealer
- Tambahan asesories lainnya
- Kondisi barang (baik, sedang, buruk)

Dokumen (data kendaraan)

- BPKB asli harus ada
- STNK asli
- KTP nama terakhir di BPKB
- Kwitansi blanko 3 (tiga) lembar, 1 lembar bermaterai
- Surat-surat lain yang mendukung tentang keabsyahan dokumen
- Faktur asli harus ada (apabila tidak ada mintakan persetujuan tertulis dari pemohon)

Catatan :

Pengajuan produk sesuaikan dengan tahun/ merk yang dicover oleh PSM (sesuai dengan kebijakan manajemen) juga termasuk didalamnya tentang uang muka, asuransi administrasi, dan rate)..

c. Analisa Wawancara

Dalam wawancara dijelaskan kepada pemohon secara garis besar tentang prosedur, syarat-syarat, cara pembayaran, dan ketentuan-ketentuan kredit, serta kemungkinan resiko yang akan terjadi bila pemohon lalai dalam melakukan kewajibannya.

Sekaligus membicarakan tentang produk yang diajukan berikut asuransi TLO/ All risk (serta keterbatasan asuransi dalam hal melayani klaim), dan ditegaskan kembali masalah perhitungan kredit yang diajukan (uang muka, asuransi, rate, administrasi, dan lainnya).

Perlu dijelaskan pula pada pemohon bahwa proses keseluruhan dari permohonan kredit tersebut akan memakan waktu maksimal 3 hari kerja, dengan catatan bahwa baik form permohonan kredit dan dokumen yang dilampirkan telah terisi dan lengkap. Dan bila memungkinkan lakukan layanan secepat mungkin (*one day service*). Penandatanganan semua form harus dilakukan oleh pemohon, istri/ suami, penjamin (bila ada) dihadapan penganalis kredit sekaligus sesuaikan tanda tangan pada KTP.

d. Analisa Konsumen

Untuk meneliti kelayakan konsumen tersebut untuk disetujui kreditnya dengan dasar 5 C, yaitu :

1. Karakter

Karakter adalah etikat baik perilaku dari konsumen sehingga dalam berlangsungnya perjanjian kredit dapat menyelesaikan pembayaran tepat waktu.

2. Capital

Dari segi capital adalah untuk mengetahui harta kekayaan atau aset yang dimiliki dari pihak konsumen tersebut maupun harga benda lainnya yang menjadi kepunyaan konsumen. Sehingga konsumen tersebut mampu melakukan pembayaran terhadap kewajibannya.

3. Capacity

Dari segi capacity untuk mengetahui kemampuan konsumen yang dipadukan dengan penghasilan konsumen tiap bulan kira-kira dapat mencukupi atau tidak untuk melakukan pembayaran angsurannya.

4. Condition

Untuk mengetahui keadaan perekonomian di pihak konsumen jangka panjang. Apakah mampu menyelesaikan pembayaran angsuran dalam jangka waktu 1 tahun mendatang dan prospek ke depan bidang usahanya.

5. Collateral/ Jaminan

Untuk menjaga pihak konsumen yang memiliki karakter baik tapi secara kemampuan masih kurang maka perlu dimintakan tambahan berupa jaminan minimal sebanding dengan pembiayaan.

Apabila semua analisa persetujuan sudah dilakukan dan mendapat persetujuan segera dilakukan pemberitahuan ke dealer atau konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian pihak dealer atau konsumen tersebut segera mendapat kepastian bahwa permohonan kredit pembiayaan telah disetujui. Pemberitahuan tersebut bisa disampaikan secara lisan agar para

pihak segera mempersiapkan untuk pembayaran uang muka persiapan pengiriman dan penyelesaian administrasi agar segera dilakukan *delivery* atau pengiriman barang.⁸

Menurut Keterangan Bapak Parno, selaku konsumen PT. Wahana Otto Mitra Multi Artha, pemberitahuan keputusan pengajuan kredit dari dealer hanya butuh waktu 1 hari, selanjutnya konsumen tinggal melunasi uang muka.⁹

Penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan melampirkan beberapa dokumen terdiri dari :

1. Surat perjanjian pembiayaan

Yang isinya para pihak menandatangani surat perjanjian tersebut bermaterai cukup dibuat rangkap tiga.

Pihak pertama dari PT yang berkedudukan di Jakarta, berkantor cabang di Semarang yang selanjutnya disebut sebagai kreditur.

Pihak kedua, pihak nasabah yang selanjutnya disebut sebagai pihak debitur.

Dalam lembar dokumen ini berisi tentang perincian pembiayaan, jangka waktu, penggunaan pembiayaan, pengakuan hutang, asuransi, denda akan keterlambatan, pembayaran kembali, cedera janji, dan lain-lain.

2. Surat persetujuan istri

3. Blanko kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani

⁸ Taufik, *Loc.cit.*

⁹ Parno, *Wawancara*, Semarang, 20 Oktober 2005.

4. Surat kuasa
5. Surat pernyataan asuransi
6. Surat sanggup transfer
7. Surat pesanan (*purchase order*) atau PO rangkap 3

Semua bagian atau dokumen perjanjian ini suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang lain.

Menurut konsumen PT. Mitsui Cabang Semarang, Bapak Nasrudin sebelum penandatanganan kontrak dilakukan biasanya pihak dealer, sudah melakukan pengiriman kendaraan terlebih dahulu. (konsumen ini sebagai pembeli mobil 3 kali di PT. Nasmoco Cabang Pemuda yang semuanya dibiayai PT. Mitsui Cabang Semarang).¹⁰

Dalam penandatanganan kontrak tentunya seorang analis kredit sudah memberikan penjelasan wawancara dan pembuatan survei report dan persetujuan pimpinan perusahaan pembiayaan

1. Untuk pembelian unit baru atau motor baru PO yang dikeluarkan pihak perusahaan pembiayaan segera dikirimkan ke dealer atau show room sebagai dasar bukti bahwa pihak kepenbiayaan sudah setuju dan akan menyelesaikan pembayarannya.
2. Lembar asli untuk dealer dilampirkan pada saat penagihan
3. Lembar kedua disimpan dealer
4. Lembar ketiga untuk arsip perusahaan pembiayaan.

¹⁰ Nasrudin, *Wawancara*, Semarang (November 2005)

5. Untuk pencairan dana pembiayaan langsung mengisi permohonan pembayaran dan biasanya dilakukan via transfer atau giro.

Untuk selanjutnya proses penagihan. Biasanya lebih dikenal pencairan dari dealer atau show room ke perusahaan pembiayaan konsumen. Berkas-berkas yang perlu dilampirkan untuk penagihan adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi bermaterai sebesar harga OTR (*on the road*)
2. PO asli yang dikirim dari dealer atau show room.
3. Kunci duplikat
4. Surat pernyataan dari dealer untuk mobil atau motor baru yang isinya BPKB akan diserahkan ke pihak perusahaan pembiayaan konsumen selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
5. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin
6. Surat pernyataan mobil atau motor baru atau bekas tidak dalam sengketa dan jaminan keabsahan surat-suratnya.
7. Khusus untuk mobil bekas berikut disertakan BPKB asli beserta kelengkapannya.

Pada saat itu pula pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pembayaran dalam bentuk giro atau transfer dalam waktu maksimal 2 (dua) hari atau yang telah diperjanjikan lebih dulu.

Pembayaran pelunasan dari PT. Mitsui ke dealer biasanya dengan cara transfer dalam 1 (satu) minggu dua kali pembayaran yaitu hari Selasa dan Kamis, selama ini tidak pernah mengalami kendala.¹¹

¹¹ Sarjono, *Wawancara*, Pimpinan PT.Nasmoco Kaligawe Semarang.

Dalam hal ini proses pelaksanaan pembiayaan konsumen telah dilaksanakan sampai dengan hak konsumen dan hak dealer atau show room sekaligus kewajiban perusahaan pembiayaan telah sebagian terpenuhi. Demikian pula pihak konsumen akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya.

Jenis pekerjaan pemohon yang menjadi perhatian atau dihindari pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam menyetujui perjanjian kredit dari dealer atau show room adalah sebagai berikut :¹²

1. Profesi yang penghasilan bulanannya tidak tetap (meskipun besar).
2. Profesi yang sebagian besar keluar kantor, sehingga sulit ditemui untuk dilakukan penagihan, kecuali bila bersedia langsung dibayar lewat kasir di tempat pemohon bekerja yang dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani secara resmi dan asli.
3. Profesi yang membuat seseorang menjadi glamour/ penuh kemewahan meskipun berpenghasilan tetap.
4. Profesi yang membuat seseorang menjadi ahli dalam berdebat kusir dengan memanfaatkan ketidakjelasan.
5. Pekerjaan-pekerjaan musiman yang tidak mempunyai kontrak kerja.
6. Profesi yang membuat seseorang dekat atau mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan (power).
7. Profesi yang melanggar norma-norma sosial.

¹² Materi Pelatihan, *Traning dan Recruitment*, PT. Mitsui.

8. Profesi lain (Pengacara, ABRI, Pilot, Pramugari/ pramugara, Wartawan dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai perusahaan pembiayaan di Kota Semarang, rata-rata isi dan klausulnya hampir sama walaupun ada perbedaan yang tidak berarti. Sehingga penyusun perlu mengambil sampel 1 (satu) dari PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia Cabang Semarang.¹³

Setelah terjadinya proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu :

1. Pihak konsumen atau debitur
2. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia Cabang Semarang.

Pihak lain yang secara tidak langsung terlibat yaitu :

1. Asuransi
2. Dealer atau show room.

3. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Dilakukan Antara Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Konsumennya

Perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Semarang rata-rata memberikan fasilitas pembiayaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat baik baru maupun bekas. Proses pelaksanaan pembiayaan konsumen diawali

¹³ Jefri Richard, *Loc cit.*

dengan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak dealer baik motor maupun mobil sebagai acuan untuk masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Pihak konsumen datang ke dealer untuk melakukan pembelian terhadap kendaraan roda empat maupun roda dua baik baru maupun bekas dengan cara kredit. Oleh pihak dealer atau show room ditawarkan perhitungan perincian angsuran tiap bulan dan berapa uang muka yang akan dibayar apabila konsumen bersedia segera diberikannya DP sebagai tanda jadi.

Pihak dealer mengajukan aplikasi permohonan pembiayaan yang akan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan dengan melalui analis kreditnya melakukan pengecekan baik data dokumen maupun data konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen menganalisa dan memberikan keputusan layak atau tidaknya permohonan kredit disetujui. Apabila permohonan kredit disetujui diterbitkannya PO (*Purchasing Order*) sebagai bukti pesanan kendaraan sekaligus persetujuan yang akan melakukan pembayaran pelunasan terhadap konsumen yang membeli barang di dealer tersebut.

Penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen, perincian biaya, angsuran setiap bulannya dan dokumen aplikasi yang lain sebagai satu kesatuan perjanjian ini.

Pihak dealer melakukan penagihan apabila sudah diselesaikannya pembayaran uang muka dan pengiriman kendaraan beserta syarat-syarat kelengkapan seperti :

- a. Pernyataan penyerahan BPKB selambat-lambatnya paling lama dua bulan, untuk mobil atau motor bekas berikut BPKB asli dan faktur (copy asli).
- b. Kunci duplikat.
- c. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- d. Kwitansi bermaterai OTR.
- e. Tanda terima penyerahan barang ke konsumen.

Pihak perusahaan pembiayaan mengecek tagihan tersebut kemudian membayar sejumlah kekurangannya dalam bentuk giro maupun transfer dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari.

Pada saat pembayaran ke dealer sudah dilakukan, pada saat itu pula pelaksanaan perjanjian pembiayaan mulai berlaku dan pihak debitur berkewajiban menyelesaikan pembayaran angsuran berikut bunga dan biaya lain dalam jangka waktu tertentu.

Pihak dealer menyerahkan BPKB kepada perusahaan pembiayaan pada waktu dua bulan untuk kendaraan baru berikut faktur (copy asli) untuk disimpan di pihak kreditur.¹⁴

Dasar hukum usaha pembiayaan konsumen belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang sedangkan mengenai tata cara perijinan pembiayaan konsumen diatur dalam :

- a. Putusan Presiden RI No. 1 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Lembaga Pembiayaan.

¹⁴ Erni, *Wawancara*, Karyawan PT. Nasmoco Cabang Semarang.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku 3 KUH Perdata tentang Perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian didefinisikan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Hal ini memberi konsekuensi bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi debitur dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut atau kreditur.

Suatu perjanjian dinyatakan syah apabila memenuhi syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen yang selanjutnya disebut perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku 3 KUH Perdata dapat digunakan untuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pinjaman uang dengan bunga, namun kenyataannya dalam praktek perjanjian tersebut agak berbeda dalam contoh pembiayaan terhadap pembelian unit mobil, konsumen tidak mendapatkan pinjaman uang tetapi mendapatkan pinjaman mobil. Tetapi ada pula persamaannya dalam contoh konsumen yang memerlukan dana dari pembiayaan ini mendapatkan pinjaman uang ditambah dengan bunga. Sebetulnya tidak berbeda jauh, karena uang yang dipinjamkan langsung dibayarkan ke pihak dealer.

Dalam Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan :

Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaiannya.

Dalam hal ini pihak yang meminjamkan diperkenankan memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah bunga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumen berbeda dengan perjanjian pinjam pakai pada umumnya karena yang meminjamkan bukanlah sebagai pemilik barang.

Tujuan dilakukan pembiayaan kepada konsumen adalah untuk memberi kesempatan pihak konsumen agar dapat membeli barang tetapi tidak mempunyai dana tunai yang pembayarannya nanti dapat dilakukan secara berkala atau mengangsur. Dengan demikian apabila karena alasan apapun

pihak pemberi dana tidak menyediakan dananya maka jual beli antara pihak dealer dengan konsumen bisa akan batal.

Berdasarkan hasil penelitian pembayaran harga barang tidak langsung dibayar oleh pembeli akan tetapi dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atas dasar adanya perjanjian pembiayaan jual beli yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini tentunya memberikan syarat kepada pihak konsumen agar penyerahan barang tidak diikuti dengan penyerahan dokumen pelengkap seperti BPKB. Sedangkan dokumen pelengkap BPKB akan diserahkan kepada pihak perusahaan pembiayaan sebagai jaminan atas pembayaran hutang pembiayaan. Adanya jual beli seperti ini tidak menjadi masalah mengingat adanya kebebasan berkontrak seperti yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan ini menurut hukum yang berlaku akan mengakibatkan beralihnya hak-hak si berpiutang (dealer) terhadap si berhutang (konsumen) kepada pihak ketiga dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen sebagai subrogasi yang telah diatur dalam KUH Perdata sesuai dengan Pasal 1400 KUH Perdata yang menyatakan :

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan dengan Undang-Undang.

Dengan demikian bila mengacu pada Pasal 1401 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk sahnya subrogasi itu harus dibuat dengan akta autentik yang berarti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris. Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia dan perusahaan pembiayaan lainnya subrogasi yang terjadi antara penjual

dengan perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilakukan dengan akta autentik tetapi dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian bahwa subrogasi yang terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak penjual itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak syah.

Menurut KUH Perdata dalam ketentuan Pasal 1320 karena kedua belah pihak telah sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, berarti perjanjian tetap syah karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka kebebasan membuat perjanjian kapanpun dan dimanapun dapat dilakukan sepanjang perjanjian itu dibuat secara syah.

3. Hubungan Hukum antara Lembaga Pembiayaan dengan Konsumen dan dengan Pihak yang Terkait

Hubungan hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen setelah menerima pembiayaan, untuk selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan disebut dengan kreditur dan pihak konsumen disebut dengan debitur. Bahwa kreditur dalam hal ini perusahaan yang terdaftar dan memiliki ijin melakukan pembiayaan konsumen. Dan bahwa debitur memerlukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang akan diuraikan dalam daftar perincian pembiayaan konsumen yang selanjutnya disebut perjanjian dan

meminta kreditur untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor termasuk selanjutnya disebut barang.¹⁵

Debitur adalah pihak yang menerima dana pembiayaan dari pihak kreditur suatu perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin usaha. Setelah perjanjian ini disepakati, pihak debitur berkewajiban membayar kembali hutang pembiayaan yang dilakukan secara mengangsur berkala setiap bulannya. Selain pembayaran angsuran yang tepat waktu dan biaya-biaya yang timbul karena perjanjian ini atau keterlambatan pembayaran dan penguasaan barang serta cedera janji menjadi tanggung jawab pihak debitur.

Sedangkan hubungan hukum yang mengikat antara pihak kreditur kepada debiturnya adalah kewajiban pihak perusahaan pembiayaan untuk memberikan BPKB dengan mengecek keabsahan BPKB dan faktur (copy asli) pada instansi yang berwenang dan memastikan bahwa BPKB dan faktur tersebut bukan duplikat. Penyerahan kewajiban tersebut dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tentunya dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain tersebut diatas dari hasil penelitian pihak kreditur membantu dan mengurus penggantian klaim dari pihak asuransi terhadap hilang atau rusaknya risiko atas kendaraan tersebut.

b. Besarnya pembiayaan dan biaya lain

Untuk selanjutnya pihak debitur berkewajiban membayar hutang sesuai dengan lampiran perjanjian pembiayaan konsumen Pasal 4 ayat (1) disebutkan :

¹⁵ Arsip, *Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, PT. Mitsui.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka debitur dengan ini (sekarang dan untuk kemudian hari atau pada waktunya) menerima pinjaman uang dari kreditur atau yang dipakai sebagai pembayaran lunas kepada penjual dalam perjanjian ini, maka debitur mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada kreditur untuk sejumlah uang yang disebut dalam daftar perincian konsumen ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran hutang tersebut dengan sebaik-baiknya maka debitur memberikan kepada kreditur jaminan berupa antara lain tetapi tidak terbatas pada BPKB asli, faktur (copy asli).

Selain membayar angsuran tiap bulannya, debitur juga dibebankan biaya-biaya lain yang disebabkan oleh perjanjian ini Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen :

Kreditur dan debitur dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam daftar perincian pembiayaan konsumen, perjanjian tambahan, dan surat pernyataan dan atau perjanjian lainnya yang merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini antara lain tapi tidak terbatas pada barang, hutang pokok, bunga, jangka waktu pembiayaan pembayaran angsuran, dan denda keterlambatan.

Dengan demikian dalam perjanjian ini, tidak terbatas biaya-biaya yang timbul seperti asuransi, biaya administrasi dan biaya lain yang diatur dalam kontrak tetapi juga biaya pengadilan, biaya pengacara dan biaya lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab pihak debitur.

c. Pembayaran kembali

Setelah menerima pembiayaan dari pihak perusahaan PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia Cabang Semarang debitur juga akan melakukan pembayaran setiap bulannya dengan cara mengangsur dan tepat pada

waktunya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 lampiran perjanjian pembiayaan konsumen :

Debitur akan mengembalikan hutang secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam daftar perincian pembiayaan konsumen dan menandatangani surat sanggup dan giro yang merupakan janji akan membayar segala kewajiban-kewajiban yang merupakan hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain seperti diuraikan dalam perjanjian ini.

Akibat dari keterlambatan pembayaran sesuai dengan daftar perincian pembiayaan konsumen denda karena pembayaran angsuran lewat dari tanggal angsuran adalah 0,20% per hari dari angsuran per bulan. Sedangkan perhitungan untuk pembiayaan yang dilunasi dalam jangka waktu pembiayaan berakhir adalah sebesar sisa pokok pinjaman yang dihitung secara anuitas ditambah 5% dari sisa pokok pinjaman tersebut dan diperhitungkan dengan biaya-biaya lain, misalnya bunga berjalan.¹⁶

d. Penguasaan Barang

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus memelihara dan memakai barang dengan sebaik-baiknya. Dan debitur harus membayar biaya pemeliharaan, pajak dan biaya-biaya lain untuk kepentingan barang tersebut. Seolah-olah debitur tidak mempunyai atau memiliki barang ini biarpun dalam atas nama kepemilikan adalah debitur sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 butir (1 dan 3) :

Kreditur dengan ini menyerahkan barang kepada debitur untuk disimpan atau dipakai, debitur akan menyimpan atau memakai barang untuk dan atas nama kreditur dan debitur akan menguasai kepada kreditur untuk menyimpan semua dokumen-dokumen asli

¹⁶ Daftar Perincian Perjanjian Konsumen, PT. Mitsui.

yang bersangkutan mengenai hak milik berupa antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur (copy asli) dan BPKB asli.

Debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau memberatkan barang dengan pemindahan secara fidusia lainnya, beban hipotek (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur.

e. Peristiwa Cidera Janji dan Upaya Hukum

Pasal 9 perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia Cabang Semarang disebutkan setiap peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa cidera janji :

Pasal 9 (1) :

- a. Debitur tidak membayar jika saat jatuh tempo setiap jumlah berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diuraikan dalam daftar perincian pembiayaan konsumen, surat sanggup, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;*
- b. Debitur tidak mempertahankan atau debitur melakukan perubahan besar pada asuransi yang diisyaratkan Pasal 8 (asuransi) perjanjian ini.*
- c. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan perjanjian ini, yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh debitur, dan jika dapat diperbaiki, kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja bank setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh kreditur kepada debitur.*
- d. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh debitur berdasarkan perjanjian ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan perjanjian ini, yang telah/ harus dibuat dan dilaksanakan oleh debitur, atau dalam dokumen atau pernyataan apapun yang telah disampaikan kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian itu ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.*

- e. *Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang menurut pendapat kredit sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil debitur, atau dengan cara lain berakibat atau membawa akibat yang sangat merugikan pada kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini.*

Pasal 9 ayat (2) :

- a. *Debitur sepakat dan setuju dengan kreditur bahwa setiap terjadinya peristiwa cidera janji yang terjadi berdasarkan perjanjian ini akan juga merupakan suatu peristiwa cidera janji berdasarkan perjanjian lain antara kreditur (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain) dan debitur berdasarkan perjanjian mana debitur berhutang atau dapat menjadi berhutang kepada kreditur, dan debitur dengan pemberitahuan kepada debitur berhak untuk segera memutuskan dan melakukan upaya hukum setiap atau semua perjanjian baik menurut atau yang dimaksud dalam perjanjian ini maupun perjanjian lainnya termasuk pada pelaksanaan eksekusi hak-hak jaminan kreditur.*
- b. *Setelah kreditur memberitahukan mengenai pemutusan perjanjian tersebut kepada debitur maka debitur tidak lagi menguasai barang tanpa seijin kreditur dan debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada debitur, akan tetapi :*
 - i. *Debitur harus segera mengembalikan barang kepada kreditur sesuai dengan daftar perincian pembiayaan konsumen perjanjian ini, dan atau semua barang yang telah diberi/ diserahkan oleh kreditur kepada debitur menurut perjanjian ini.*
 - ii. *Debitur tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian ini dan daftar perincian pembiayaan konsumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - *Semua jumlah hutang pokok, dan biaya tambahan yang harus dibayar dan belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam daftar perincian pembiayaan konsumen.*

- *Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh debitur.*

Sedangkan hubungan hukum yang mengikat antara pihak perusahaan pembiayaan kepada konsumennya adalah kewajiban sebagai berikut :

1. Perusahaan bertanggung jawab atas pemberian BPKB dengan mengecek keabsahan BPKB dan faktur pada instansi yang berwenang untuk memastikan bahwa BPKB dan faktur bukan palsu atau duplikat serta dilakukan pemblokiran.
2. Membantu pengurusan dan penggantian klaim dari pihak asuransi terhadap hilangnya atau risiko yang terjadi pada barang tersebut.

b. Hubungan Hukum antar dealer dengan perusahaan pembiayaan konsumen

Sepintas perjanjian pembiayaan konsumen hanya melibatkan dua pihak antara lembaga pembiayaan dengan debiturnya, tetapi sebetulnya ada pihak lain yang peranannya sangat besar berkewajiban langsung kepada pihak lembaga pembiayaan yaitu dealer.

Pihak dealer adalah penjual kendaraan yang bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjual barang secara kredit. Selain itu dalam tanggung jawabnya pihak dealer berkewajiban

memberikan menyerahkan BPKB dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan.

Selain itu pihak dealer atau shoow room menjamin tentang keabsahan surat dan kendaraan tersebut dalam keadaan baik tidak tersangkut permasalahan dengan pihak lain dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Pihak dealer juga bertanggung jawab terhadap pengiriman barang sampai di tempat tujuan serta keadaan fungsi barang tidak dalam keadaan cacat atau karena adanya kesalahan dari pihak pabrik.

Dari hasil penelitian di lapangan rata-rata pihak dealer atau show room kendaraan bermotor khususnya mobil unit baru berhubungan langsung dengan pihak lembaga pembiayaan karena yang membayar lunas terhadap pembelian unit kendaraannya. Selain dealer berkewajiban memberikan pelayanan serta jaminan teknis pada barang, serta membebaskan perusahaan pembiayaan dari segala tuntutan yang kemungkinan dilakukan oleh debitur tentang adanya cacat yang tampak maupun tidak karena kesalahan pabrik. Ini untuk menjaga kelangsungan bisnis dari pihak dealer agar debitur sebagai pelanggan tidak merasa dikecewakan.

Sedangkan kewajiban lain pihak dealer yang harus diberikan kepada pihak perusahaan dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen khususnya untuk unit baru pihak dealer wajib menyerahkan BPKB dalam jangka waktu selama-lamanya dua bulan. Mengenai status barang dari pihak dealer harus menjamin tentang keabsahan surat-surat dan barang

tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

c. Hubungan hukum antara asuransi lembaga pembiayaan dan konsumen

Dalam bagian ini kewajiban asuransi secara langsung tidak nampak tapi mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting. Dari hasil penelitian untuk mengatasi masalah risiko atas obyek pembiayaan konsumen maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen pihak lembaga pembiayaan mewajibkan debitur untuk mengasuransikan barangnya dalam jenis bentuk pertanggungan sebagai berikut :

1. All risk (comprehensive)
2. Total lost only (TLO)

Kewajiban pihak asuransi kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. Mitsui Cabang Semarang memberikan pelayanan atau service sebaik-baiknya kepada debiturnya. Dalam hal ini bisa berpengaruh terhadap kelancaran dan kelangsungan pembayaran angsuran serta menjaga kondisi barang yang akan menjamin keberadaannya baik dalam risiko kerusakan atau kehilangan. Sebetulnya hal ini tidak secara langsung berhubungan dengan lembaga pembiayaan tetapi bertanggung jawab langsung dengan pihak debitur.

Kewajiban pihak asuransi kepada debitur bersifat langsung karena penguasaan barang yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen di bawah kekuasaannya yang sekaligus akan menjadi pemiliknya apabila kewajiban pembayaran angsuran dan biaya lain sudah lunas.

Dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan debiturnya yaitu mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan konsumen yang berupa hak dan kewajiban, tanggung jawab para pihak dan besarnya biaya perlu dicantumkan. Hubungan hukum ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen kecuali telah diperjanjikan lain yang gunanya memberikan perlindungan dan jaminan bagi kepentingan yang memang perlu dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :

Setiap perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.”

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini juga diatur hal-hal yang disepakati untuk dilaksanakan atau suatu pemenuhan prestasi yang bersifat halal dalam pengertian tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pihak asuransi bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan uang ganti rugi terhadap resiko hilang atau rusaknya kendaraan sebagai obyek pembiayaan konsumen dan ikut terlibat langsung dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Sebagai akibat pengalihan risiko dimungkinkan sepanjang memenuhi kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi, hanya saja hubungan hukumnya langsung dengan konsumen. Sedangkan hubungan hukum dengan pihak perusahaan pembiayaan sebagai fasilitator untuk

mempermudah atas kenyamanan dan kelangsungan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.

Dalam hubungannya dengan pihak perusahaan pembiayaan service asuransi mempunyai peranan penting dalam kelancaran pembayaran angsuran, bagaimanapun juga berpengaruh terhadap obyek yang sebagai mobilitas dalam bidang usaha ataupun operasional pihak konsumen.

Semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian hendaknya dijadikan pedoman dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang kebiasaan dan kepatutan seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

4. Masalah yang Timbul dan Bagaimana Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

- a. Masalah yang timbul pada perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Semarang

Berdasarkan wawancara dengan responden, yang menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah apabila pihak debitur tidak menyelesaikan pembayaran angsuran dengan tepat waktu dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perjanjian ini sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan pihak debitur yang tidak membayar

angsuran dengan tepat waktu dan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain :¹⁷

1. Debitur mengisi dengan data palsu

Dalam hal ini pihak debitur tidak berterus terang pada saat mengisi formulir permohonan kredit, terutama hasil wawancara dengan analis kredit dalam hal penghasilan dan penggunaan kendaraan. Sebenarnya pihak perusahaan pembiayaan sudah melakukan analisa kredit dengan sebaik-baiknya tetapi calon debitur memang memaksakan diri untuk melakukan permohonan pembiayaan. Sehingga menimbulkan tersendatnya angsuran.

2. Barang dioper-alih atau berpindah tangan

Masalah ini sering timbul karena pihak debitur menggadaikan atau mengoper-alihkan barang yang menjadi obyek pembiayaan sehingga beban pembayaran angsuran berpindah kepada orang lain. Sehingga pembayarannya pun akhirnya terhambat/ macet karena yang menguasai barang memang tidak mampu membayar angsuran.

3. Ada jaringan mafia

Hal ini bisa terjadi karena adanya pihak-pihak yang ikut bekerja sama dalam melakukan transaksi untuk memperjual-belikan atau menggadaikan terhadap obyek (barang) ke pihak lain. Pihak-pihak tersebut antara lain :

¹⁷ Jimmy, *Wawancara*, Bagian Collection, PT. Mitsui Cabang Semarang

- Adanya oknum

Adanya jaringan yang mempunyai modus tersendiri yang bekerja sama dengan gadai gelap dan menggunakan nama orang lain untuk menguasai barangnya dan tidak dilakukan pembayaran angsuran ke pihak kreditur.

- Adanya kerjasama antara dealer

Pihak dealer melakukan kerjasama dengan konsumen yang berupa data fiktif maupun rekayasa agar barang yang menjadi miliknya dapat segera terjual. Hal ini mempengaruhi pihak konsumen untuk melakukan permohonan kredit yang hanya membayar uang muka guna mendapatkan barang tanpa melakukan pembayaran angsuran tiap bulan.

4. Barang hilang sebelum pembayaran lunas

Dalam hal ini yang lebih berperan adalah pihak asuransi karena debitur harus tetap melakukan pembayaran angsuran apabila barangnya hilang. Dalam proses klaim asuransi untuk kendaraan yang hilang memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga pihak debitur merasa kesulitan terlebih lagi apabila kendaraannya untuk kelancaran usaha atau pekerjaan yang berhubungan dengan penghasilan.

b. Permasalahan yang timbul di pihak debitur

1. Perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani antara kreditur dan debitur cenderung berat sebelah dengan keuntungan di pihak kreditur, dimana hak-hak debitur cenderung tidak disebutkan.

2. Dalam penagihan angsuran pembayaran, pihak perusahaan pembiayaan sering menggunakan juru tagih atau *debt collector* baik profesional maupun yang amatir bahkan “tukang pukul” yang keberadaannya dilihat kurang sopan.
 3. Apabila debitur yang melakukan wanprestasi dan diikuti dengan penarikan barang petugas di lapangan cenderung memberi harapan untuk dapat menebus kendaraan kembali dengan membayar sisa angsuran yang tertunda. Tapi pada kenyataannya debitur disuruh melunasi seluruh hutang dengan cara sekaligus sampai dengan jangka waktu sehingga debitur tidak mampu melakukannya.
 4. Apabila jangka waktu pembayaran angsuran sudah terselesaikan adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur dalam menetapkan besarnya diskon pelunasan dan denda keterlambatan.
- c. Masalah timbul dari pihak asuransi
1. Proses penggantian risiko kehilangan terhadap obyek atau kendaraan terlalu lama bahkan sampai memakan waktu 3 (tiga) bulan lebih. Ini disebabkan karena harus menunggu laporan kemajuan dari Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resort yang dilanjutkan ke Kepolisian Daerah sehingga terbit rekomendasi dari Kepala Direktorat Serse Kepolisian Daerah.
 2. Pencarian kendaraan yang hilang sering mendapat kesulitan di lapangan karena banyaknya kejahatan yang sering merusak atau mengganti identitas kendaraan baik nomor polisi, nomor rangka maupun nomor mesin.

3. Biaya dan proses pengurusan klaim terlalu berbelit-belit yang disertai sangat rumit yang memakan waktu lama, sehingga mengganggu aktivitas debitur.

Cara penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan adalah :

1. Pihak analisa kredit harus lebih berhati-hati dalam melakukan wawancara, menganalisa, dan melakukan survei lingkungan terhadap calon debitur
2. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan oper kredit dari debitur lama ke calon debitur yang baru secara resmi apabila kendaraan sudah berpindah tangan.
3. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan langkah-langkah penagihan dengan melalui juru sita atau collector untuk memberikan surat tagihan dan denda pada setiap keterlambatan pembayaran.
4. Memberikan surat peringatan pertama dan kedua tentang keterlambatan angsuran dan harus segera melakukan pembayaran serta memberikan diskon pelunasan dan denda keterlambatan sebelum pemutusan perjanjian.
5. Melakukan penarikan kendaraan untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaran yang menjadi beban debitur.
6. Melakukan musyawarah atau perundingan untuk menjual obyek perjanjian guna membayar beban angsuran ke pihak perusahaan pembiayaan sisanya dikembalikan kepada debitur agar tidak dirugikan.

7. Meminta bantuan kepada pihak lain agar dilakukan perdamaian dengan debitur sebagai solusi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak kreditur.
8. Pengurusan asuransi dilakukan dengan secepatnya cukup melapor ke Polsek atau Resort dngan bukti laporan polisi.

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah apabila debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran dengan tepat waktu sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pihak PT. Mitsui Cabang Semarang selalu memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penarikan barang, biasanya dengan surat peringatan pertama dan kedua agar pihak debitur segera melakukan pembayaran ditambah dengan biaya keterlambatan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 HUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Si berhutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ia menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Sedangkan sebab karena tidak berbayarnya angsuran tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah karena pihak debitur tidak memberikan keterangan secara jujur dan memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dalam menghadapi permasalahan debitur yang menggadaikan atau mengoper-alihkan barang berakibat terhambatnya pembayaran angsuran ini

dikarenakan pihak pemakai yang baru tidak ada beban tanggung jawab moral dengan pihak kreditur.

Adanya jaringan mafia yang bekerjasama dengan pihak oknum dan pihak dealer membuat konsumen yang lain ikut terpengaruh untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dengan cara mendapatkan hak pembiayaan tetapi tidak melakukan pembayaran setiap bulannya.

Barang yang hilang dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian kredit mempengaruhi pihak debitur untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya terlebih-lebih terhadap kendaraan yang menjadi mobilitas usaha maupun operasional yang vital.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya pihak PT. Mitsui dan perusahaan pembiayaan lainnya mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam prakteknya berdasarkan hasil penelitian pihak debitur kebanyakan tidak mentaati ketentuan yang ada dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala yang sangat rumit tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Selain memberikan solusi oper-alih, diskon denda, penyelesaian cara damai, menjual kendaraan untuk penyelesaian pembayaran hutang, penarikan kendaraan di tempat orang lain bahkan sampai dengan meminta bantuan pihak kepolisian

dalam penyelesaian masalah, jika terpaksa sampai ke tingkat pengadilan jika langkah tersebut harus dilakukan. Karena semua ini untuk mengembalikan hak-hak perusahaan yang telah menderita kerugian akibat wanprestasi biarpun di tingkat pengadilan banyak mengalami kesulitan dikarenakan waktu dan biayanya terlalu lama menunggu keputusan yang mempunyai hukum tetap.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia atau perusahaan pembiayaan lainnya proses rata-rata adalah sama, dengan bermulanya pihak calon debitur yang membutuhkan pembiayaan terhadap pembelian kendaraan. Apabila dalam perhitungan perincian sudah sepakat dan data-data sudah tersedia pihak perusahaan pembiayaan melakukan survey dan analisa untuk menentukan layak dan tidaknya disetujui permohonan tersebut.

Bilamana sudah disetujui kelayakan tersebut segera diterbitkannya PO sebagai pemesanan unit atau barang dan pihak dealer atau show room segera melakukan penyerahan barang dan penagihan ke pihak perusahaan pembiayaan. Pihak perusahaan akan membayar dalam bentuk giro atau transfer dalam waktu sampai dengan 3 (tiga) hari.

Selanjutnya pihak konsumen melakukan pembayaran angsuran atau secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan setiap bulannya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah dilakukan.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai prosedur yang sama dengan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen lainnya yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Dalam pengaturannya tetap disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku dengan

sumber hukum utama dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian jual-beli bersyarat. Ini dikarenakan belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya.

2. Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen dan pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah :

- a. Hubungan Hukum antara Konsumen (Debitur) dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)
- b. Hubungan Hukum antara Dealer dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen
- c. Hubungan Hukum antara Asuransi dengan Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen

3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitsui Leasing Kapital Indonesia dan perusahaan pembiayaan lainnya adalah karena tidak terbayarnya pembayaran angsuran dan biaya-biaya lain dengan tepat waktu. Sedangkan penyelesaian permasalahan adalah ditempuh dengan jalan damai dengan solusi diskon pelunasan dan denda keterlambatan, melakukan oper-alih, serta penjualan kendaraan untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya.

Sebisa mungkin menghindari penyelesaian melalui pihak kepolisian maupun sampai ke pengadilan, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila menemui jalan buntu dengan cara tersebutpun harus tetap ditempuh.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebelum ditandatangani hendaknya dijelaskan dan diterangkan secara detail terlebih dahulu serta menggunakan pihak ketiga sebagai juru damai atau yang disebut Badan Arbitrase.
2. Hubungan hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen disebutkan secara jelas hingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat melindungi pihak-pihak yang pantas dilindungi oleh hukum, khususnya masalah besarnya diskon pelunasan, denda dan biaya lain.
3. Dalam menjaga kelancaran dan kestabilan pembayaran angsuran pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak perlu menggunakan seorang juru tagih (*debt collector*) yang amatir maupun profesional (tukang pukul) tetapi cukup dengan surat atau telepon.
4. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul didahulukan dengan cara damai dengan cara negosiasi sehingga tidak merugikan salah satu pihak karena cara tersebut relatif lebih murah dan efektif.
5. Melakukan analisa yang tajam serta berhati-hati dalam melakukan survei lingkungan dengan baik, layak atau tidakkah konsumen tersebut untuk disetujui permohonannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Kadir Muhamad, dan Rilda Murmiati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Advendi, Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Ali Ridlo, R. *Hukum Dagang tentang Pinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura*, Haji, Bandung, 1992.
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit, Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.
- Ch. Gatot Wardoyo, *Kredit Sekitar Klausal-klausal Perjanjian Bank*, Bandung, 1995.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1983.
- Hari Saheroji, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara baru, 1980
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, *Leasing Ditinjau dari Aspek Hukumnya*, Seminar Penjagaan Alternatif Pendanaan Proyek Industri Kimia Dasar dengan Sistem Leasing, Jakarta, 13-14 Mei 1985.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1983.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1998.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komtemporer*.

- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perkreditan Komtemporer*, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Radik Purba, *Mamahami Asuransi di Indonesia*, Terma Grafika, Jakarta, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1991.
- Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata (dalam Teori dan Praktek)*, Penerbit ALM, Bandung, 1983
- _____, *Perjanjian Konsumen Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Teknis Yustikal*, MARI, Jakarta, 1994.
- Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 2002, ps-3.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Pertentangan*, Yogyakarta, Seksi FH. UGM, 1983.
- Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perdata di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit : Liberty, Cetakan I, Yogyakarta.
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Cetakan I, Yogyakarta.
- Sri Susilo Y., Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.
- Soedharyo Soimin, *Kitab-kitab Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999.

Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit: Alm, Bandung.

_____, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 10, Penerbit PT. Inter Masa, Jakarta.

_____ dan R. Tjipto Sudibio, Prof, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985.

Suroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981.

Wiryo Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981.

2. ARTIKEL

Koran Suara Merdeka, *Konsumen Lembaga Pembiayaan Stabil*, 7 September 2005, hal 4.

Lembaga Keuangan Non Bank, Pameran di Lawang Sewu Semarang, November 2005.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

SK Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.